

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 2	HALAMAN: 168 - 178	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

PERGESERAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DI WILAYAH PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB)

Meilanny Budiarti Santoso¹, Nunung Nurwati^{2*}, Nurliana Cipta Apsari³

^{1,2,3} Pusat CSR. Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

*korespondensi: nunung.nurwati@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) telah menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial dan perubahan ekonomi pada masyarakat sekitar, sehingga perhatian semua pihak tidak cukup hanya diberikan pada kondisi fisik kewilayahannya saja, dinamika demografi pada masyarakat sekitar pembangunan BIJB pun harus diperhatikan. Salah satu bentuknya adalah terjadinya pergeseran mata pencaharian warga masyarakat sekitar, namun faktanya sangat sulit bagi masyarakat untuk berpindah pola dari kultur masyarakat agraris ke bidang pekerjaan lainnya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan in-depth interview dan studi litelatur sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah pembangunan BIJB telah berupaya untuk melakukan berbagai bentuk usaha dalam menyikapi pergeseran mata pencaharian yang terjadi, salah satu pilihan pekerjaan baru yang banyak diminati dan dipandang sesuai dengan keadaan kapasitas masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bekerja adalah menjadi pekerja migran ke luar negeri pada sektor informal. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pengelola BIJB beserta berbagai pihak terkait lainnya dalam menyikapi dinamika pada masyarakat sekitar pembangunan BIJB tersebut adalah dengan: menciptakan peluang usaha, melakukan opportunity job dengan adanya bantuan modal dan pelatihan, serta melakukan upaya penyediaan lahan pertanian baru oleh pemerintah (tukar guling lahan), sehingga petani dapat membeli lahan tersebut dengan harga yang sesuai dengan kemampuan petani.

Kata kunci: pekerja migran, perubahan sosial, pembangunan, pembangunan BIJB

ABSTRACT

The development of West Java International Airport (BIJB) have become the push factor of social and economic change in the surrounding community, thus the attention of every stakeholders should not merely considering the physical profile of the area, but also the demographic dynamic profile of the community. One of the profile is the shift of livelihood of the surrounding community, however, the community have to struggle to shift their livelihood pattern from the agraria cultural community to another type of livelihood. This descriptive research is using qualitative approach with in-depth interview and literature study as the data collection technique. The research show that the people residing in nearby community of BIJB have undertook many other form of commerce in addressing the shift of livelihood, with one option of new attractive and accorded with the capacity of the people – low education level and lack of specific skills possession- livelihood is by becoming migrant worker at informal sector in foreign countries. Various effort can be conducted by government, The airport management and other stakeholders involved in attending the dynamic profiling of the community, through creating business opportunities, conducting opportunity job with assist in the form of

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 2	HALAMAN: 168 - 178	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

tangible capital and training, as well as providing new farming area through exchanging the area, allowing the farmers to buy the area in their affordable price.

Keywords: *migrant worker, social change, development, BIJB development*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu bentuk perubahan sosial. Soekanto (2012: 259) menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dan berpengaruh terhadap sistem nilai, norma sosial, sistem pelapisan sosial, struktur sosial, proses-proses sosial, pola dan tindakan sosial, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan sosial bersifat berantai dan saling berhubungan diantara unsur-unsur kemasyarakatan yang terkait di dalamnya.

Pembangunan merupakan upaya pemerintah atau suatu kelompok untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik; pada sektor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan ataupun yang lainnya guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman. Secara filosofis, Sanit (1987: 112) dalam Rismayani (2018) memaparkan bahwa pembangunan merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Dalam konteks ke-Indonesia-an, harapan tersebut diwujudkan dengan kata "adil" dan "makmur".

Salah satu unsur untuk mewujudkan pembangunan di suatu wilayah adalah dengan disediakannya sarana dan prasarana transportasi sebagai simpul yang menghubungkan dan diharapkan dapat berperan sebagai pembentuk, pengarah dan pemacu pertumbuhan wilayah.

Keberadaan infrastruktur yang baik akan berpengaruh positif terhadap perekonomian dan memacu pertumbuhan wilayah, seperti halnya pembangunan sarana transportasi bandar udara yang akan menjadi pusat pertumbuhan baru dan memicu munculnya kegiatan-kegiatan lain di sekitarnya.

Proses pengembangan dan perencanaan di suatu wilayah tentunya selalu memerlukan tanah sebagai posisi dari pembangunan yang dilakukan (Johara, 1992). Begitu pun dengan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di wilayah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang tergolong pada pembangunan yang cukup besar karena menggunakan lahan sekitar 1.800 Ha. Agustina (2010) menyatakan berdasarkan pencarian lokasi dengan menggunakan aplikasi *google earth* menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang dipergunakan untuk pembangunan BIJB berupa lahan pertanian. Adapun secara terperinci tanah yang digunakan untuk pembangunan BIJB terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, pemukiman masyarakat, fasilitas umum dan situ (Agustina, 2010).

Pembangunan BIJB tentunya menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat, sehingga perhatian yang diberikan tidak cukup hanya pada kondisi fisik kewilayahan saja, melainkan juga harus diperhatikan berbagai kondisi terkait dinamika demografi di wilayah sekitar. Faktanya pembangunan BIJB telah menggeser pemukiman warga dan menggeser

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 2	HALAMAN: 168 - 178	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

sebagian besar lahan pertanian masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang mencakup aspek sosial, ekonomi maupun aspek lingkungan. Semua dampak tersebut berimbas pada berbagai perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Bentuk perubahan sosial pada masyarakat yang terjadi dengan adanya alih fungsi lahan adalah selain masyarakat kehilangan tempat tinggalnya sehingga harus beralih ke lokasi lain, masyarakat pun kehilangan lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian mereka, karena sebagian besar lahan yang digunakan dalam pembangunan BIJB adalah lahan pertanian produktif. Indah (2014) menegaskan bahwa pembangunan BIJB telah berdampak pada perubahan sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

Menyikapi perubahan mata pencaharian bagi masyarakat setempat bukanlah hal yang mudah, sehingga dibutuhkan kemampuan yang baik dan fleksibilitas yang tinggi untuk dapat menyikapi perubahan dalam bidang mata pencaharian, karena setiap masyarakat telah membentuk kebudayaannya sendiri, yang salah satu unsurnya berupa mata pencaharian (Koentjaraningrat, 1990).

Studi yang dilakukan oleh Puryantoro (2013) mengungkapkan bahwa dana yang diterima oleh petani dari hasil penjualan tanah pertaniannya sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi seperti belanja kebutuhan sehari-hari, memperbaiki rumah dan membeli rumah. Hanya

sebagian kecil saja dari para petani yang memanfaatkan uang hasil penjualan tanah pertaniannya untuk modal usaha, seperti membeli tanah pertanian atau membuka usaha warung. Terkait hal tersebut, Subali (2005) menyatakan pola pemanfaatan uang hasil konversi lahan untuk petani lapisan atas lebih mengarah ke penggunaan sektor produktif, sedangkan petani lapisan bawah lebih cenderung ke arah penggunaan untuk konsumtif.

Dalam menyikapi pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke non pertanian, berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat setempat. Salah satunya adalah menjadi pekerja migran di luar negeri. Menjadi pekerja migran ke luar negeri merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan bagi sebagian masyarakat di wilayah pembangunan BIJB, mengingat Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kantong wilayah asal penempatan pekerja migran ke luar negeri di Jawa Barat.

Migrasi merupakan fenomena umum dan selalu menjadi tema perdebatan di Indonesia, bahkan menjadi sebuah isu penting dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang dikirim ke luar negeri setiap tahunnya. Hugo (2009) menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara penyumbang PMI terbesar di Asia bersama dengan Filipina, Sri Lanka, dan Bangladesh. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan selama kurun waktu 2015-2017 Indonesia telah menempatkan ribuan pekerja migran dengan jumlah tertinggi pada 2015 yaitu sebanyak 275.736 PMI (BNP2TKI, 2018).

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 2	HALAMAN: 168 - 178	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

METODE

Penelitian ini dilakukan di wilayah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan pengumpulan data sekunder yaitu berupa data BPS, monograf desa, monograf kecamatan, dan berbagai data sekunder lainnya terkait isu pembangunan BIJB.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di wilayah pembangunan BIJB, pihak pemerintahan setempat di tingkat RT/RW, pemerintahan Desa dan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah penduduk Kecamatan Kertajati pada tahun 2017 berdasarkan hasil registrasi kecamatan adalah berjumlah 49.364 jiwa yang terdiri dari 23.739 jiwa laki-laki dan 25.625 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) di kecamatan Kertajati berjumlah 16.136 Kepala Keluarga (KK). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2016, terdapat kenaikan jumlah penduduk yaitu sebesar 538 jiwa yang terdiri dari 201 jiwa laki-laki dan 337 jiwa perempuan. Dalam hal ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk di kecamatan Kertajati bermata pencaharian di bidang pertanian (Kecamatan Kertajati Dalam Angka, 2018).

Perubahan mata pencaharian dari masyarakat agraris ke sektor non pertanian membutuhkan upaya adaptasi yang baik dan

sebenarnya dari masyarakat, yaitu jika masyarakat ingin dapat tetap bertahan hidup di lokasi pemukimannya yang baru. Namun, hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat sebagian besar penduduk kecamatan Kertajati bermatapencaharian di sektor pertanian dan tentunya dengan adanya pembangunan BIJB, membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian utama tersebut.

Adanya Pembangunan BIJB, selain diperuntukan bagi pertumbuhan di wilayah Jawa Barat yang sejalan dengan tujuan yang telah dicanangkan dalam program pembangunan, juga berpotensi terhadap peningkatan pengangguran di wilayah kecamatan Kertajati khususnya, yaitu jika masyarakat setempat tidak melakukan upaya-upaya penyesuaian diri dan tidak melakukan peningkatan kapasitas diri dalam keberadaan lingkungannya yang baru. Dengan kultur masyarakat setempat yang masih sangat kental dengan pola agraris akan sangat sulit untuk berpindah pola ke sektor industri ataupun ke bidang pekerjaan lainnya, mengingat tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang masih sangat rendah.

Sejauh ini, pergeseran mata pencaharian pada masyarakat di wilayah pembangunan BIJB diantaranya adalah menjadi pedagang dengan membuka warung, menjadi supir, membuka rental mobil, menjadi buruh bangunan, sebagian kecil masyarakat berkesempatan menjadi satgas di BIJB, dan banyak di antara masyarakat yang memilih menjadi pekerja migran ke luar negeri.

Data tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Ekayani (2017) yang menyatakan alih fungsi lahan pertanian dapat

mengubah struktur mata pencaharian dalam satu keluarga. Dengan adanya pembangunan BIJB, rumah tangga petani yang awalnya mengandalkan sektor non usaha tani sebagai pekerjaan sampingan mulai beralih ke sektor non pertanian dengan memanfaatkan peluang alternatif pekerjaan di antaranya membuka warung, usaha rental kendaraan, usaha kos-kosan, buruh bangunan dan menjadi satgas BIJB (Hidayat & Ekayani, 2017).

Pergeseran dan pilihan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya bukan tanpa alasan, karena setiap individu mempunyai beberapa macam kebutuhan, baik itu kebutuhan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga psikologis. Individu dianggap sebagai makhluk sosial rasional dalam menentukan pilihan. Umumnya individu akan menerapkan konsep prinsip ekonomi dalam usaha memilih beberapa alternatif terbaik dan memberikan manfaat terbesar dan kerugian atau risiko yang terkecil.

Berdasarkan berbagai bentuk pergeseran mata pencaharian dan pilihan pekerjaan baru yang

dilakukan oleh masyarakat, salah satu jenis pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kertajati adalah menjadi pekerja migran ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka menduduki peringkat keenam (sesuai data pada tabel 1) sebagai kabupaten di Jawa Barat dalam penempatan pekerja migran ke luar negeri. Menjadi pekerja migran ke luar negeri dipandang oleh masyarakat sebagai pilihan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan mereka, karena tidak membutuhkan persyaratan dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi dan dipandang sebagai salah satu pilihan yang menjanjikan bagi masyarakat di wilayah pembangunan BIJB karena sebagian dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ingin mengubah nasib keluarganya untuk memutus rantai kemiskinan secara cepat serta untuk meningkatkan taraf kehidupan rumah tangga mereka.

Berikut ini adalah data penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di provinsi Jawa Barat berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2015-2017:

Tabel 1
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017

No	Kab/Kota	Tahun dan Presentase					
		2015	%	2016	%	2017	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kab. Indramayu	19.025	30	16.625	33	17.618	35
2	Kab. Cirebon	10.953	17	10.078	20	10.170	20
3	Kab. Subang	7.254	12	6.522	13	7.853	15
4	Kab. Cianjur	5.437	9	3.227	6	1.975	4
5	Kab. Karawang	3.907	6	2.749	5	3.098	6
6	Kab. Majalengka	3.593	6	3.235	6	2.851	6
7	Kab. Sukabumi	3.660	6	2.250	4	1.926	4
8	Kab. Bandung	1.362	2	773	2	471	1

No	Kab/Kota	Tahun dan Presentase					
		2015	%	2016	%	2017	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
9	Kab. Purwakarta	1.346	2	732	1	519	1
10	Kab. Bandung Barat	1.016	2	648	1	490	1
11	Kab. Ciamis	898	1	643	1	458	1
12	Kab. Garut	853	1	559	1	494	1
13	Kab. Bekasi	471	1	345	1	380	1
14	Kab. Bogor	457	1	329	1	299	1
15	Kab. Tasikmalaya	466	1	336	1	259	1
16	Kab. Kuningan	369	1	285	1	341	1
17	Kab. Sumedang	333	1	294	1	257	1
18	Kota Bandung	327	1	221	0	162	0
19	Kota Cirebon	221	0	240	0	197	0
20	Kota Sukabumi	260	0	209	0	136	0
21	Kota Bekasi	213	0	196	0	175	0
22	Kota Depok	186	0	124	0	154	0
23	Kota Bajar	129	0	104	0	105	0
24	Kota Tasikmalaya	120	0	104	0	75	0
25	Kab. Pangandaran	32	0	80	0	171	0
26	Kota Cimahi	96	0	81	0	69	0
27	Kota Bogor	80	0	58	0	53	0
		63.064	100	51.047	100	50.756	100

Sumber : Pusat Litbang dan Informasi, BNP2TKI, 2018

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang menjadi kantong pekerja migran asal Jawa Barat. Berdasarkan perjalanan sejarah, sejak dulu pekerja migran asal Kabupaten Majalengka berdasarkan jumlahnya paling banyak bekerja di Arab Saudi dan Taiwan. Namun, sejak pemerintah memberlakukan peraturan moratorium penempatan pekerja migran ke Arab Saudi pada tahun 2011, pekerja migran asal Kabupaten Majalengka kemudian banyak yang bekerja di Taiwan dan Malaysia karena jaminan kerja di Taiwan lebih baik, mendapatkan gaji besar serta relatif tidak ada persoalan, sedangkan ke Malaysia karena negara ini jaraknya dekat dengan Indonesia dan menggunakan bahasa Melayu yang mirip dengan bahasa Indonesia.

Purnawati (2018) memaparkan bahwa pekerja migran asal Kabupaten Majalengka saat ini diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 21.000 orang yang tersebar di sejumlah negara seperti Saudi Arabia, Bahrain, Hongkong, Malaysia, Jepang, Korea, Singapura, Taiwan, dan sejumlah negara lainnya. Motivasi pekerja migran berangkat bekerja ke luar negeri rata-rata karena keinginan untuk membangun rumah yang bagus atau cita-cita untuk menyekolahkan anak-anaknya. Hasilnya adalah saat ini dapat kita jumpai di sejumlah desa ataupun kecamatan di Kabupaten Majalengka banyak rumah dengan bangunan mewah atau paling tidak rumah permanen yang dibangun dari hasil kerja keras menjadi pekerja migran di luar negeri.

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 2	HALAMAN: 168 - 178	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

Kebanyakan pekerja migran asal Kabupaten Majalengka bekerja pada sektor informal, yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pengemudi (*driver*) dan pekerja sektor informal lainnya. Hal ini tentunya sejalan dengan tingkat pendidikan pekerja migran asal Kabupaten Majalengka yang pada umumnya hanya memiliki ijazah sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama dan tanpa memiliki keahlian ataupun keterampilan khusus dalam bekerja. Berdasarkan catatan Disnaker Kabupaten Majalengka di Tahun 2017 pekerja migran yang berangkat ke luar negeri mencapai 2.573 orang. Kebanyakan mereka bekerja ke Taiwan sebanyak 869 orang, Malaysia sebanyak 848 orang, Singapura 380 orang, Hong Kong 257 orang, Brunei Darussalam 108 orang, Uni Emirat Arab 13 orang, Bahrain 9 orang, Jepang 3 orang, serta Saudi Arabia 1 orang. Untuk di Korea, Hongkong, atau Jepang kebanyakan pekerja migran magang di pabrik atau petugas kesehatan, begitupun dengan di Taiwan selain mereka menjadi pembantu rumah tangga. Adapun pekerja migran di Malaysia banyak yang bekerja di perkebunan sawit dan karet.

Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri diperkirakan jauh lebih banyak dari data tersebut, karena sebagian di antara mereka tidak melaporkan keberangkatannya kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka atau tidak mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka karena mereka berangkat dari kabupaten/kota lain. Selain itu, ada juga yang tidak terdaftar karena mereka berangkat melalui agen/calo secara ilegal.

Banyaknya jumlah pekerja migran menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk

menjadi pekerja migran ke luar negeri. Rahmitha et al., (2016) menyatakan bahwa beberapa di antara pekerja migran bahkan melakukan migrasi berulang kali ke luar negeri, hingga berhasil mengumpulkan uang untuk keperluan tertentu. Penelitian lain pun sejalan dengan pendapat tersebut, Hugo (2005) menyatakan bahwa penduduk Asia yang bekerja di luar negeri, termasuk Indonesia, memiliki pendapatan rata-rata yang lebih besar daripada rata-rata pendapatan mereka di dalam negeri.

Menurut Salvatore (1997: 494-495) ada cukup banyak keuntungan ekonomi dari migrasi internasional, bagi para pekerja migran, tingkat pendapatan di tempat baru lebih tinggi daripada pendapatan yang mereka peroleh dari tempat asalnya. Dengan pendapatan yang lebih tinggi itu pekerja migran akan memperoleh standard hidup yang lebih baik dan juga dapat menyediakan pendidikan, peluang kerja serta masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya.

Namun demikian, berbagai hasil studi menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri banyak yang mengalami berbagai permasalahan dan kesulitan, terutama dialami oleh pekerja migran nonprosedural (ilegal). Hidayah (2018) menyatakan bahwa buruh migran perempuan memiliki kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan buruh migran laki-laki dalam mengalami perdagangan manusia (*human trafficking*), perdagangan organ, pemerkosaan, penyiksaan, penipuan, pelanggaran hak-hak dasar mereka sebagai pekerja, serta hukuman di negara tempat mereka bekerja mulai dari deportasi hingga hukuman mati.

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 2	HALAMAN: 168 - 178	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

BNP2TKI mencatat sebanyak 200.000 laporan kasus pelanggaran hak asasi dialami oleh pekerja migran Indonesia dalam rentang tahun 2011-2016 (Hidayah, 2018). Solidaritas Perempuan (2014) juga melansir data yang dipublikasikan oleh *International Organization for Migran* (IOM) terkait kasus perdagangan manusia yang dialami oleh buruh migran Indonesia, khususnya buruh migran perempuan. Lebih lanjut, Solidaritas Perempuan juga melaporkan bahwa selama kurun waktu 2005-2011 *International Organization for Migran* (IOM) telah menangani sebanyak 3.942 kasus perdagangan manusia yang menimpa warga negara Indonesia dengan 53,33% korban di antaranya adalah buruh migran perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di luar negeri.

Penempatan pekerja migran nonprosedural ke luar negeri terjadi karena adanya bantuan keluarga atau kenalan yang sudah berada di Negara tujuan ataupun dengan menggunakan jasa agen tidak resmi//calo. Pekerja migran yang menggunakan jalur nonprosedural biasanya memandang sulit dan mahal untuk menempuh berbagai prosedur yang harus dilakukan, serta merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya yang mahal dalam membuat berbagai dokumen yang harus dilengkapi. Ada juga pekerja migran nonprosedural yang karena keluguannya tidak mengetahui informasi apa saja yang harus dipersiapkan untuk bekerja ke luar negeri, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh agen tidak resmi//calo untuk memberangkatkan mereka secara nonprosedural, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, desakan dan iming-iming dari agen//calo yang datang ke desa-desa menawarkan berbagai kenyamanan dengan

bekerja di luar negeri pun seringkali menjadi salah satu jalan pekerja migran berangkat untuk bekerja ke luar negeri secara nonprosedural. Keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural membuat pekerja migran tidak memiliki dokumen dan tidak terdaftar, sehingga pada saat terjadi permasalahan di luar negeri, keluarga akan mengalami kesulitan untuk mencari data keberadaan pekerja migran tersebut.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, pemerintah dan berbagai pihak terkait harus mulai memperhatikan dinamika demografi di wilayah pembangunan BIJB, khususnya terkait dengan migrasi karena hal tersebut bisa menjadi sumber permasalahan bagi wilayah sekitar di kemudian hari jika saat ini tidak mulai di cari jalan keluarnya. Pembangunan BIJB di satu sisi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, namun di sisi lain terjadinya pergeseran mata pencaharian masyarakat (dari petani menjadi pekerja migran luar negeri) yang tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat berjenis kelamin laki-laki saja, melainkan banyak diantaranya adalah perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah akan mendatangkan permasalahan turunan pada aspek keluarga dan pengasuhan anak sebagai peran utama yang seharusnya dilakukan oleh perempuan (ibu) terhadap keluarganya.

Selain itu, pergeseran mata pencaharian masyarakat dari petani menjadi pekerja migran luar negeri pun dapat dipandang sebagai bentuk ketidakmampuan masyarakat setempat untuk beralih mata pencaharian di wilayah setempat, dan juga sebagai bukti kekalahan mereka dalam berkompetisi di wilayah tempat tinggalnya sendiri, karena seharusnya merekalah yang berkiprah dan

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 2	HALAMAN: 168 - 178	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

menjadi pemeran utama dalam mengisi dan menikmati pembangunan di wilayahnya.

SIMPULAN

Pembangunan BIJB faktanya telah menggusur banyak pemukiman milik warga dan juga menggusur sebagian besar lahan pertanian produktif warga masyarakat, sehingga berdampak pada terjadinya perubahan sosial dan juga perubahan ekonomi pada masyarakat setempat yang notabene sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani (di sektor agraris). Terdapat berbagai bentuk pergeseran mata pencaharian dan pilihan pekerjaan baru yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menyikapi hal tersebut, salah satu jenis pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kertajati adalah menjadi pekerja migran ke luar negeri pada sektor informal, karena dipandang sesuai dengan kapasitas mereka yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bekerja.

Berbagai upaya dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun dengan bekerja sama antara pemerintah dengan pihak pengelola BIJB ataupun berbagai pihak terkait lainnya. Salah satu alternatif kebijakan yang bisa mengurangi dampak negatif dari pergeseran mata pencaharian akibat alih fungsi lahan tersebut adalah: Pertama, menciptakan peluang usaha yang memungkinkan untuk dikerjakan oleh para petani yang lahannya dikonversi dalam bentuk pelatihan keterampilan. Kedua, melakukan *opportunity job* dengan adanya bantuan modal dan pelatihan (kewirausahaan, ternak, perbengkelan dan produk olahan makanan) sebagai upaya untuk diversifikasi usaha petani.

Dalam hal ini, model pelatihan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan potensi sumber daya yang tersedia. Proses pelatihan dapat di desain untuk meningkatkan kemampuan bekerja, baik secara individual, kelompok, maupun sebagai kegiatan organisasi/perusahaan secara keseluruhan. Ketiga, upaya penyediaan lahan pertanian baru oleh pemerintah (tukar guling lahan), dalam hal ini petani dapat membeli lahan tersebut dengan harga yang sesuai dengan kemampuan petani karena lahan yang tersedia saat ini di sekitar lokasi pembangunan BIJB harganya sudah sangat mahal, sehingga saat ini petani lebih memilih menyewa lahan sawah untuk bisa berusahatani.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, C. (2010). Panduan Tutorial dan Praktikum Mata Kuliah Survei Tanah dan Evaluasi Lahan. Malang: Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Ariani Ni W.D, Suresmiathi A.A.A. (2011). Pengaruh Kualitas Tenaga Kerja, Bantuan Modal Usaha dan Teknologi terhadap Produktivitas Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jimbaran. *Ejurnal EP Unud*, vol. 2 (2): 102-107.
- BNP2TKI. (2018). Data Penempatan dan Perlindungan TKI. Jakarta: Pusat Litbang dan Informasi
- BNP2TKI. (2018). Profil PMI Jawa Barat. Jakarta: Pusat Litbang dan Informasi.
- Hidayah, A. (2018) Restoring the Rights of Indonesian Migrant Workers through the Village of Care (Desbumi) Program in

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 2	HALAMAN: 168 - 178	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

- Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Hidayat, Y., Ismail, A. & Ekayani, M. (2017). Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi (Studi Kasus Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Jawa Barat). *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*. Vol. 20 No. 2. Hlm. 171-182
- Hugo, G. (2005). The New International Migration in Asia. *Asian Population Studies* 1 (1): 93–120.
- Hugo, G. (2009). Governance and institutional issues in migration in Asia. Dalam *Cross-Border Governance in Asia: Regional Issues and Mechanisms*. New York: United Nations [dalam jaringan] [25 Agustus 2018].
- Indah, N. F. & Samsul Ma'arif. (2014). Pengaruh Keberadaan Bandara Internasional Kualanamu Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi dan Perubahan Fisik Kawasan Sekitarnya. *Teknik PWK*. Vol. 3 No. 1
- Johara, J. T. (1992). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kecamatan Kertajati Dalam Angka. (2018). Majalengka: Badan Pusat Statistik
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purnawati, T. (2018). Memaknai Majalengka Sebagai Lumbung TKI. *Pikiran-rakyat.com*. diakses pada 6 Januari 2020 pukul 17.29 WIB. [<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01302874/laporan-khusus-memaknai-majalengka-sebagai-lumbung-tki-432456>]
- Puryantoro, S. (2013). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pendapatan Petani (Studi kasus: Desa Landangan Kecamatan Kapongan). Diakses melalui unars.ac.id, pada tanggal 5 Februari 2016.
- Rahmitha, H., Dyan W., Niken K., Dinar D. P., Hafiz A., Veto T. I., dan Rakhmadi, M. F. (2016). *Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Peayanan Umum*. Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Edisi kelima jilid 1. Erlangga. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Solidaritas Perempuan. (2014). *Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya di Negara ASEAN*. Laporan Hasil Pemetaan di Wilayah: Mataram, Sumbawa, Kendari, Makassar, Palu, Karawang. Jakarta: Solidaritas Perempuan.
- Subali, A. (2005). Pengaruh Konversi Lahan Terhadap Pola Nafkah Rumahtangga Petani. Skripsi. Bogor: Program Studi Komunikasi dan Pengembangan

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 9	NOMOR: 2	HALAMAN: 168 - 178	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.25553
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

Masyarakat Fakultas Pertanian Institut
Pertanian Bogor.

Rismayani, Rika Ade. (2018). Perubahan Sosial
Pasca Pembangunan Bandara

Internasional Jawa Barat (BIJB). Skripsi.
Bandung: Jurusan Sosiologi. Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UIN Sunan
Gunung Djati